

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur adalah kabupaten baru yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan berada dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur terbentuk menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 pada tahun 2003. Bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Kaur ini adalah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko muko. Sejak berdiri dan dalam perjalanannya sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya. Pembangunan terhadap semua sektor sudah berlangsung dengan baik, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan maupun sektor-sektor lainnya. Terutama semenjak tahun 2005 Kabupaten Kaur sudah menghasilkan buah sawit yang cukup besar jumlahnya, guna mendukung potensi itu dibangun industri pengolahan minyak sawit dengan sistem fermentasi yang hasilnya diekspor ke berbagai Negara.⁴⁸

Lapangan Merdeka Bintuhan terletak di jantung Kota Bintuhan, Lapangan ini sudah terbentuk sejak zaman dahulu kala. Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat ramai sering dilakukan di tanah lapang ini. Tanah Lapang, merupakan sebutan yang sering diucapkan oleh masyarakat Bintuhan-Kaur untuk

⁴⁸ Agus Setiyanto, "Bengkulu dalam Lintas Sejarah: Dari Sistem Pemerintahan Tradisional hingga Birokrasi Kolonial", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5- 6 Agustus 2008 di Bengkulu, him. 4.

menyebut Lapangan Merdeka Bintuhan. Tanah Lapang, artinya tanah yang luas. Bintuhan terletak di daerah pesisir dataran rendah yang sangat luas, sehingga lapangan ini menjadi Tanah Lapang yang terluas yang pernah ada di daerah Bengkulu.

Kecamatan Kaur Selatan dimekarkan menjadi 2 kecamatan : Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap. Kecamatan Kaur Tengah dimekarkan menjadi 3 kecamatan : Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung. Kecamatan Kinal dimekarkan menjadi 2 kecamatan : Kecamatan Kinal dan Kecamatan Semidang Gumay. Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 5 kecamatan : Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Gud Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Lungkung Kule. Khusus untuk Kecamatan Kelam Tengah, sebagian wilayahnya berasal dari desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning dan sebagian lagi berasal dari Kecamatan Kaur Utara⁴⁹

Sedangkan asal usul nama Bintuhan yang menjadi ibukota Kabupaten Kaur, menurut ceritanya berasal dari kata Bin'tuan yang mana dahulunya masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit Bintuk (kini pilek), penyakit ini mewabah hampir seluruh Kewedanaan Kaur (Zaman Belanda) sehingga masyarakat menyebutnya penyakit Bintuk. Pada waktu itu banyak masyarakat yang terkena penyakit ini kemudian secara etimologi berubah menjadi Bintuan. Karena perkembangan zaman akhirnya orang

⁴⁹ Agus Setiyanto, cp. cit, him. 5

daerah lain datang atau 20 berkunjung dan ditanya mau kemana? Mereka menjawab mau ke daerah ini dan menyebut ke Bintuan. Lama kelamaan karena Ejaan Yang Disempurnakan (Bahasa Indonesia) dan memperhalus bahasa digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuhan.⁵⁰

B. Letak Geografis dan Keadaan Alam Kabupaten Kaur

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak pada posisi 103° 03' - 103° 34' LS dan 04° 55' - 04° 59' BT dengan luas wilayah sekitar 5.362,08 km² • Posisinya terletak sekitar lebih kurang 250 km dari kota Bengkulu, dan memiliki luas wilayah sekitar 2.369,05 km² dengan jumlah penduduk lebih kurang 110.428 jiwa dengan mata pencaharian utama penduduknya mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penduduknya tinggal menyebar secara berkelompok di 119 desa dan tiga kelurahan, baik di Ibu Kota Kabupaten maupun di wilaya-wilayah Kecamatan-kecamatan.

Penduduk Kabupaten Kaur terdiri dari berbagai sukubangsa, yaitu Rejang, Lembak, Serawai, Semendo, Pasemah, Pekal, dan berbagai macam asal dan keturunan seperti Minangkabau, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis, dan Melayu, bahkan ada juga yang dari India, Cina. Dari semua etnis yang ada, etnis Rejang dan Pasemah merupakan penduduk asli Kabupaten Kaur dan merupakan etnis terbesar. Semua penduduk

⁵⁰ Agus setyanto. Orang-Orang Besar Bengkulu. Yogyakarta: Ombak. 2006., hal 99-101. Agus Styanto. Elite Pribumi Bengkulu. Jakarta: Balai Pustaka., hal112-114

ini merasakan dan menampilkan dirinya sebagai "Orang Kaur". Kabupaten Kaur menempati sebagian besar lereng bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Di daerah tersebut umumnya mempunyai sungai-sungai yang lebih pendek. Sungai-sungai yang mengalir ke pantai Barat dan berpangkal di daerah sekitar Bukit⁵¹

Kabupaten Kaur menempati sebagian besar lereng bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Di daerah tersebut umumnya mempunyai sungai-sungai yang lebih pendek. Sungai-sungai yang mengalir ke pantai Barat dan berpangkal di daerah sekitar Bukit Kabupaten Kaur 1n1 terbentuk menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 pada tahun 2003. Bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Kaur ini adalah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko muko. Sekarang Kabupaten Kaur sudah berusia tujuh tahun dan selama tujuh tahun perjalanannya sudah banyak hal yang telah dilakukan. Pembangunan terhadap semua sektor sudah berlangsung dengan baik, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan maupun sektor-sektor lainnya.

Terutama semenjak tahun 2005 Kabupaten Kaur sudah menghasilkan buah sawit yang cukup besar, guna mendukung potensi itu dibangun industri pengolahan minyak sawit dengan sistem fermentasi yang hasilnya di ekspor ke berbagai Negara. Posisi Kabupaten Kaur lebih tepatnya berada di tepi pantai bagian barat pulau Sumatera, memiliki garis pantai yang relatif cukup

⁵¹ Agus Setiyanto. *Elite Pribwri Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke 19*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001 ., hal 90.

panjang dengan gelombang ombak yang selalu menghantam pantainya. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai Barat Sumatra, maka tidak salah daerahnya memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa.⁵²

Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda maupun pada masa Inggris, daerah pantai Kabupaten Kaur yaitu Pelabuhan Linau pernah menjadi sebuah pelabuhan penting waktu itu. Pelabuhan itu menjadi pintu masuk utama bagi Belanda maupun Inggris untuk dapat berhubungan dengan penduduk Kaur dalam rangka menjalin hubungan dagang hasil bumi, diantaranya lada. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kaur tidak hanya memiliki potensi laut, tetapi juga memiliki potensi dibidang pertanian. Hal itu disebabkan karena sebagian daerahnya yaitu di bagian Timur juga berada pada dataran tinggi yang ada di Bukit Barisan. Berdasarkan kondisi letak geografis Kabupaten Kaur ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabupaten Kaur terdiri dari dataran tinggi di sebelah Timur dan dataran rendah pada bagian Barat yaitu daerah pesisir pantai Barat Sumatera.⁵³ Dari peta berikut terlihat lebih jelas letak geografis Kabupaten Kaur seperti yang telah di uraikan di atas.

C. Pemerintahan Kabupaten Kaur

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km² , terdiri dari empat

⁵² Abdullah Sidik, op. cit , hm. 169

⁵³ Ibid., him. 32

Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan,¹⁶ Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan . 17 Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah Daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya UU otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi 33 Provinsi dari sebelumnya 26 Provinsi. Seiring dengan pemekaran propinsi, kabupaten-kabupaten baru juga telah banyak terbentuk. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.⁵⁴

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Bengkulu yang beribukotakan Kota Bengkulu telah dimekarkan menjadi

⁵⁴ Ibid., him. 171

sembilan daerah kabupaten/kota, dari sebelumnya empat kabupaten/kota. Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Lejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Seiring dengan pemekaraan kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran. Sampai dengan tahun 2005 di Propinsi Bengkulu telah terbentuk 93 kecamatan, 119 kelurahan, dan 1.120 desa.

Luasnya wilayah dan banyaknya wilayah yang masih terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rentang kendali (pan of cointrol) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Kaur dan bekas Kewedanaan Seluma. Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Kaur untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dta-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Kaur untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan,

melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan.⁵⁵

Di Afdeling Kaur, sruktur kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kalipa sebagai kepala wilayah dan kepala marga. Di bawah kalipa adalah pembarab sebagai kepala marga ke dua dan di bawah pembarab adalah proatin (kepala dusun). Kepala marga biasanya bergelar pangeran, sedangkan para pembarab dan peroatin bergelar depati atau penghulu. 28 Ketika pemerintahan Asisten Residen J.H. Knoerle (1831-1833), posisi elite Bengkulu terjepit, Karena Knoerle memberdayakan pegawai Eropah yang menduduki posisi sebagai posthouder, sehingga kekuasaan para kepala pribumi semakin terbatas dan dikontrol dengan ketat. Tekanan dan intervensi terhadap kehidupan tradisional elite pribumi semakin dirasakan terutama yang berkaitan dengan lembaga adat yang sudah mapan. Penghapusan gelar kepangeranan terjadi, para kepala pribumi yang sudah mengakar, serta formasi sistem pengadilan tradisional yang sudah kokoh, hal ini merugikan para elite pribumi. Menurutnya pemakaian gelar pangeran bagi para kepala pribumi Bengkulu tidak perlu diteruskan karena tidak ada fungsinya serta tidak bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Belanda, kecuali gelar Regent (Bupati), yang diangkat sebelumnya.⁵⁶

⁵⁵ wan N. Aksa, op. cit ., him. 13.

⁵⁶ Ibid

Tahun 1966 peruangan untuk membentuk daerah otonom baru Kabupaten Kaur kembali dilakukan oleh tokohtokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi Daerah Otonom baru Kabupaten Kaur kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.³² Sebelumnya, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1946 sampai 1968, yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu.

Orde Reformasi yang lahir seiring tumbanganya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Kaur untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalam bentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Kaur. Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah.⁵⁷

Manfaat yang diharapkan dari pembentukan Kabupaten Kaur ini di antaranya adalah, (1) Potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Mempersingkat rentang kendali (span of control) sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien; (3) Sentrasentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna mendptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja; (4) menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta sistem kehidupan masyarakat yang kondusif; (5) menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah; dan (6)

⁵⁷ Zusneli ZLbir. Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan: Selama dari Wacana Hingga Realita. Laporan Penelitian. Padang : BPSNT, 2009 dan baca Jug~ Bustan A. Dali, foe. cit.

mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat⁵⁸

D. Kondisi Kawasan Tanpa Rokok di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur

Provinsi Bengkulu Kabupaten kaur merupakan wilayah yang perokok aktif dari usia 15-65 tahun. banyaknya masyarakat yang merokok ditempat umum seperti di masjid, di sekolah, ditempat olahraga ,di angkutan umum dan lainnya. hal ini menyebabkan banyak orang yang menghirup udara yang sudah tercemar dari asap rokok. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten kaur telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok terdapat dalam nomor 63 tahun 2014 tentang pelaksanaan kawasan tanpa

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum

⁵⁸ /b1d.,hlm. 2-3.

penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan 3 Kemenkes RI. 2012.

Salah Satu Kawasan tanpa rokok yaitu kawasan seperti lapangan merdeka kabupaten kaur. dampak Asap Rokok dapat membahayakan bagi kesehatan. Untuk itu Timbulnys pertanyaan kepada pemerintah daerah kabupaten kaur dalam kawasan tanpa rokok ini.

